

BAB V

KESIMPULAN

Pasca keruntuhan Imperium Ottoman yang kala itu menjadi salah satu episentrum pusat perkembangan dunia, maka tatanan dalam hubungan internasional pun perlahan berubah. Polarisasi yang sebelumnya terpusat pada negara-negara *Triple Entente* seperti Inggris, Jerman dan Perancis mulai menjadi semakin dinamis dengan kehadiran negara-negara baru pasca meletusnya perang dunia pertama dan pecahnya imperium raksasa tersebut.

Turki menjadi salah satu pecahan terbesar dari Imperium tersebut. Oleh karenanya Turki memegang peran paling strategis dalam percaturan politik Internasional kala itu. Hal itu dibuktikan dengan Turki yang menjadi atensi dunia dan menjadi lawan sekutu dibawah pimpinan Inggris dan Perancis.

Periode konflik tersebut berujung pada kesepakatan perdamaian antar pihak-pihak bertikai yang ditermaktub dalam Perjanjian Sevres yang berisi tentang penguasaan dan pembatasan wilayah atas serta akses Turki, mulai dari kaptulasi, manajemen keuangan dan perihal wilayah, termasuk salah satunya memuat pengakuan atas Kurdi, suku transnasional yang kelak menjadi bibit konflik cukup panjang.

Konten yang dianggap terlalu subjektif dan merugikan membuat masyarakat Kurdi menolak isi Traktat tersebut, masyarakat berontak. Hal tersebut memancing terjadinya perang antar Yunani yang didukung sekutu dengan Turki. Namun dalam nasib yang jauh lebih baik, Turki memenangkan perang tersebut.

Isi Traktat kemudian diganti dengan substansi yang dianggap lebih menguntungkan Turki, mulai dari

pembebasan kaptulasi, pengurusan administratif secara independen dan dimulainya periodisasi sekularisme dan modernisme di Turki.

Ditengah upaya perkembangan negara Turki modern, mencuat sebuah isu yang lama menjadi “parasit” dalam tubuh negara 2 benua tersebut. Yakni kurdi, suku tanpa negara yang telah lama hidup dalam teritori yang kini menjadi wilayah Turki modern.

Perbedaan kultur dan ideologi yang sangat mendasar antara Turki dan Kurdi membuat Kurdi termarginalisasi dari peradaban modernisasi Turki. Kurdi mendapatkan berbagai bentuk tindakan kekerasan dan terjadi upaya eliminasi ras dalam era pemerintahan Kemal Ataturk. Banyak Kurdi yang terbunuh sia-sia dan desa-desa mereka dibakar secara sengaja oleh pasukan militer Turki.

Dalam beberapa dekade mendapatkan tindakan represif atas perbedaan-perbedaan fundamental membuat dan mengorbarkan semangat nasionalisme Kurdi. Perlahan tapi pasti mereka mencoba menyusun siasat-siasat serangan balasan kepada pemusnahan ras yang mereka rasakan.

Untuk itu, pada 1978 Abdullah Ocallyan sebagai seorang berpengaruh di Kurdi yang merupakan ahli strategi dan seorang Marxist mencoba menginisiasi sebuah gerakan yang diharapkan mampu mengakomodir kepentingan Turki, kelompok ini diberi nama Partiya Karkaren Kurdistan atau PKK.

PKK diharapkan menjadi wadah bagi seluruh aspirasi masyarakat Turki. Awalnya tuntutan yang coba diakomodir oleh PKK adalah tuntutan yang sifatnya sederhana dan wajar seperti meminta hak politik dan diberikan akses untuk pendidikan. Hal ini karena pada era Kemal mereka tidak memperoleh kesempatan tersebut.

Namun karena respon pemerintah yang dianggap tidak kooperatif akhirnya terjadi perubahan perilaku dari masyarakat Kurdi khususnya PKK. Mereka akhirnya tendensi dalam menggunakan aksi-aksi esktrm dan kekerasan. Hal ini agar mereka mampu meyakinkan bahwa kekuatan militer yang dimiliki sangatlah mumpuni.

Mereka melakukan berbagai macam jenis teror pada Turki, khususnya dalam era pemerintahan Recip Tayyip Erdogan yang menjabat sebagai presiden Turki dari tahun 2014 hingga sekarang. Erdogan menjadi presiden Turki

Berbagai tindakan dilakukan sebagai bentuk manifestasi atas ketidakpuasan mereka dengan pemerintah Turki. Berbagai serangan dilakukan membuat banyak korban berjatuh dan membuat berbagai fasilitas publik hancur berantakan. Pada dasarnya yang diharapkan oleh masyarakat Turki adalah keamanan dan stabilitas wilayah.

Lantas hal ini membuat Erdogan sebagai pimpinan tertinggi mengambil keputusan tegas untuk menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang tidak lagi persuasif. Melihat kebelakang bagaimana kemudiian upaya persuasif yang dilakukannya hanya bertahan dalam waktu semantara. Kesepakatan gencatan senjata tidak mampu memberikan perdamaian yang baik. Kondisi terakhir adalah gencatan senjata tersebut mutlak hancur dan membuat kedua belah pihak kembali pada kondisi yang lebih darurat.

Erdogan yang sangat dihormati juga memberikan gambaran-gambaran dan proyeksi tentang langkah strategis yang akan ia lakukan dan pimpin demi Turki yang jauh lebih baik. Stabilitas ekonomi, sosial, politik, budaya yang goyah membuat langkah yang

paling tepat sudah seharusnya dipikirkan dan dikaji oleh Erdogan.

Pada keputusan akhir Erdogan kemudian memilih langkah tegas dengan menerapkan operasi militer yang disebut sebagai *ASDS Military Operation*. *ASDS* sendiri berkaitan dengan sistem dan cara kerja dari operasi itu sendiri yakni dengan prosedur adaptasi aream penyesuaian dan targeting kemudian eksekusi entah menangkap, melukai atau bahkan membunuh.

Operasi militer ini diharapkan mampu menjadi balasan atas segala tindakan destabilisasi yang terus meresahkan masyarakat, selain itu operasi ini juga digunakan sebagai bentuk perlawanan Turki dan menunjukkan betapa superiornya Turki sebagai salah satu negara dengan kualitas militer terbaik di dunia. Upaya untuk meredam destabilisasi tersebut hanya bingkai yang menunjukkan bahwa keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat Turki alah prioritas yang harus diperjuangkan. Menghilangkan segala bibit terorisme